



KAJIAN KUALITATIF TEORI-TEORI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

Putri Wahyuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Afni Haryanti Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Risa Lidia Batubara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: putry.wahyuni13@gmail.com

Abstrak : *Good Corporate Governance (GCG) merupakan aspek penting dalam pengelolaan perbankan syariah karena bank syariah tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teori-teori Good Corporate Governance dan relevansinya dalam penerapan tata kelola perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan GCG dan perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori Agency Theory, Stewardship Theory, Stakeholder Theory, Transaction Cost Theory, Political Theory, dan Resource Dependency Theory saling melengkapi dalam membangun sistem tata kelola bank syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penerapan Good Corporate Governance yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung keberlanjutan perbankan syariah.*

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Perbankan Syariah, Tata Kelola*

Abstract : *Abstract: Good Corporate Governance (GCG) is a crucial aspect of Islamic banking management because Islamic banks are not only focused on financial performance but also must ensure compliance with Islamic principles. This article aims to examine theories of Good Corporate Governance and their relevance to the implementation of Islamic banking governance. The research method used is a literature review, reviewing books and journal articles related to GCG and Islamic banking. The results of the study indicate that Agency Theory, Stewardship Theory, Stakeholder Theory, Transaction Cost Theory, Political Theory, and Resource Dependency Theory complement each other in building a transparent, accountable, and equitable Islamic banking governance system. The implementation of Good Corporate Governance can increase public trust and support the sustainability of Islamic banking.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Islamic Banking, Governance.*

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik dan transparan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi kepentingan stakeholders. Dalam beberapa dekade terakhir, GCG telah menjadi topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan akademis. Teori-teori yang melandasi GCG antara lain Teori Keagenan (Agency Theory) yang menjelaskan hubungan antara principal (pemilik) dan

agent (manajer), serta Teori Stakeholder yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua stakeholders, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat.

Selain itu, Teori Transparansi dan Teori Akuntabilitas juga menjadi landasan penting dalam GCG. Transparansi dalam pengelolaan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness). Transparansi berarti bahwa perusahaan harus terbuka dan jujur dalam mengungkapkan informasi yang relevan. Akuntabilitas berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Tanggung jawab berarti bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak dari tindakan dan keputusan yang diambil terhadap stakeholders. Independensi berarti bahwa perusahaan harus memiliki dewan komisaris yang independen dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perusahaan. Kewajaran berarti bahwa perusahaan harus memperlakukan semua stakeholders dengan adil dan tidak diskriminatif.

Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, meningkatkan nilai perusahaan, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan. Selain itu, GCG juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam pasar global. Oleh karena itu, GCG menjadi sangat penting dalam pengelolaan perusahaan modern untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kepentingan stakeholders. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik dapat meningkatkan kinerja dan reputasi, serta melindungi kepentingan stakeholders. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang telah menerapkan GCG sebagai bagian dari strategi bisnis mereka untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan meningkatkan nilai perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis teori-teori yang melandasi konsep Good Corporate Governance (GCG). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku teks, jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik GCG, termasuk Agency Theory, Stewardship Theory, Stakeholder Theory, Transaction Cost Theory, Political Theory, dan Resource Dependency Theory. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri serta mengkaji literatur yang memiliki kredibilitas dan relevansi akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran berbagai teori dalam membentuk dan mendukung penerapan Good Corporate Governance dalam tata kelola perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Agency Theory

Corporate governance dilatarbelakangi oleh agency theory (teori keagenan) yang menyatakan bahwa permasalahan agency muncul ketika kepemimpinan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dengan kata lain, manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemilik. Ide dasar pengelolaan agency theory memberikan cara pandang baru mengenai corporate governance. Perusahaan ditunjukkan sebagai suatu hubungan kerja sama antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Adanya vested interest manajemen mengakibatkan perlunya proses check and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu

bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana ekstern. Sistem corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2004).

Konsep Good Corporate Governance (GCG) timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antarprincipal dan agent-nya. Pemisahan dalam pengelolaan perusahaan dari pemiliknya ditujukan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Tugas para agen adalah menjaga kepentingan perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Good Corporate Governance (GCG) memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. ("Semnas Fekon 2016," 2016)

B. Stewardship Theory

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.

Pada Stewardship Theory, model of man ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan proorganisational, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan principal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima. Sebelumnya, Stewardship Theory terfokus pada kemungkinan struktur pada manager yang lebih tinggi. (Setyawan, 2010).

Penerapan teori stewardship juga mencakup pembentukan struktur tata kelola perusahaan yang kuat, termasuk komite independen, pengaturan remunerasi yang adil, dan sistem insentif yang mendorong tindakan-tindakan yang menguntungkan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, penerapan teori stewardship dalam good corporate governance dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham dan stakeholder lainnya, serta mengarah pada pengelolaan perusahaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. (Syahara et al., 2024)

C. Stakeholder Theory

Peningkatan transparansi dalam perusahaan dapat menjadi langkah penting untuk menutup celah regulasi yang sering dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak. Hal ini dapat dianalisis melalui perspektif stakeholder theory. Teori ini lahir dari kerangka ekonomi politik yang memandang perusahaan bukan hanya sebagai entitas ekonomi, melainkan juga bagian dari sistem sosial dan politik. Dengan demikian, perusahaan memiliki keterikatan erat dengan para pemangku kepentingan.

Menurut Ansoff dalam Corporate Strategy, stakeholder theory digunakan untuk menjelaskan tujuan utama perusahaan, yaitu menyeimbangkan beragam kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Lebih lanjut, Tilt (2004) memperjelas bahwa pemangku kepentingan perusahaan mencakup pemegang saham, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, bank, pemerintah, hingga masyarakat sekitar. Isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan para stakeholder dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan positif. Pendekatan normatif atau etis berfokus pada kesetaraan hak seluruh pemangku kepentingan, di mana manajer dituntut untuk mengelola organisasi agar mampu memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Dengan demikian, perusahaan diharapkan mampu mengoptimalkan hasil sekaligus meminimalkan kerugian bagi seluruh stakeholder. Sebaliknya, pendekatan positif lebih menekankan pada pemenuhan kepentingan pihak-pihak utama yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap perusahaan. Dalam konteks perpajakan, pendekatan normatif dianggap lebih relevan, khususnya karena pemerintah memiliki peran penting sebagai pemangku kepentingan yang menetapkan regulasi dan menegakkannya. Meskipun Cooper (2004) menyebut pemerintah sebagai pemangku kepentingan sekunder, faktanya pemerintah tetap memiliki otoritas besar dalam mengatur dan mengawasi kewajiban perpajakan perusahaan. Sejalan dengan pemikiran Freeman (1984), manajemen perusahaan harus mampu mencapai tujuan strategis dengan cara memenuhi kepentingan para stakeholder, termasuk pemerintah sebagai regulator utama. (Romadhon, 2020)

D. Transaction Cost Theory

Teori biaya transaksi merupakan varian teori agensi yang di antaranya didefinisikan oleh Williamson (1999) sebagai koalisi interdisipliner ekonomi, hukum dan organisasi, yang memandang sebuah perusahaan merupakan bagian organisasi yang di dalamnya ada orang-orang dengan motif serta memiliki tujuan yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa biaya dapat timbul ketika Anda mempekerjakan orang lain untuk bertindak atas nama Anda, seperti direktur terpilih untuk melakukan operasi bisnis yang Anda miliki. Teori ini mengasumsikan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan didasarkan pada efek dari transaksi bisnis (internal dan eksternal). Pemahaman konsep biaya transaksi tidak terlepas dari pengertian kegiatan termasuk transaksi dan pemrosesan kontrak. Karena, seperti mengacu pada pandangan Commons 1932 dan Coase 1937, 1960 yang ditekankan dalam Williamson (2010), unit analisis untuk konsep biaya transaksi terletak pada transaksi itu sendiri. Perusahaan tunduk pada kontrak entitas organisasi antara hubungan perusahaan dengan pemasok, karyawan, pelanggan.

kreditor dan pemegang saham, oleh karena itu perusahaan perlu menganalisis biaya kontrak untuk mengambil keputusan bisnis dan mengelola hubungan dalam kontrak. Duran & McNutt (2010) mengambil kutipan tentang bagian dari biaya transaksi Coase 1937, yang mencakup biaya monitoring (monitoring cost), biaya negosiasi (negotiating cost), serta biaya pemaksaan kontrak (enforcement cost). Berbagai bagian tersebut merupakan gambaran dari perjalanan proses yang terjadi pada sebuah kontrak, diawali kegiatan pra kontrak, bertemu dengan partner potensial, negosiasi, serta kegiatan setelahnya yaitu adanya kesepakatan kontrak, dan kegiatan yang mengatur penegakan hukum sesuai perjanjian dalam kontrak jika terjadi masalah. Teori biaya transaksi bisa dipahami sebagai mode alternatif pengorganisasian transaksi yang meminimalkan biaya transaksi. Struktur organisasi yang optimal adalah pencapaian efisiensi ekonomi] dengan meminimalkan biaya pertukaran. Setiap jenis transaksi menghasilkan biaya koordinasi untuk memantau, mengendalikan, dan mengelola transaksi.

Oleh karena itu Williamson mendefinisikan biaya transaksi secara luas sebagai biaya menjalankan sistem ekonomi perusahaan. Dia berpendapat bahwa biaya tersebut harus dibedakan dari biaya produksi dan bahwa pengambil keputusan dapat membuat pilihan untuk menggunakan struktur perusahaan atau sumber dari pasar dengan membandingkan biaya transaksi dengan biaya produksi internal. Dengan demikian, biaya adalah penentu utama dari keputusan tersebut. (Abidin & Prabantarikso, 2021)

E. Political Theory

Political theory menetapkan metode untuk mendapatkan dukungan suara dari pemegang saham, daripada membeli hak suara. Oleh karena itu, memiliki pengaruh politik dalam tata kelola perusahaan di dalam organisasi menurut Pound (1993). Dengan kata lain bahwa Political Theory menyatakan bahwa pembagian kekuasaan, keistimewaan atau pembagian keuntungan antara pemilik-pengelola dan pemangku kepentingan lainnya tergantung pada pertimbangan politik, dalam hal ini pemerintah dapat berperan penting dalam menentukan distribusi. Selain itu political theory yang menjadi dasar dari Corporate Governance bukan hanya menjelaskan pendekatan politis internal perusahaan, tetapi juga pendekatan politis dari Pemerintah. Jika dilihat dari sisi politisi di dalam internal perusahaan, teori ini melihat tata kelola berdasarkan dari terbentuknya dukungan suara pemegang saham dibandingkan dari suara atau kekuatan purchasing power.

Distribusi kekuasaan dari teori corporate governance juga harus dilihat dari perspektif budaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada model corporate governance yang dapat digunakan di banyak negara secara bersamaan atau bahkan oleh banyak perusahaan domestik. Pengaruh politisi di perusahaan akan menentukan arah kebijakan tata kelolanya. Keingintahuan publik dan juga pemerintah tentang pengambilan keputusan perusahaan sangatlah tinggi. Berkaitan pula dengan pemerintah, teori ini juga menggarisbawahi alokasi kekuatan pengaruh atau kekuasaan, yang ada di perusahaan di mana lokasi kekuatan dan kekuasaan yang ada di perusahaan, di mana alokasi kekuatan kekuasaan pada perusahaan, keuntungan dan keuntungan yang ada ditentukan dari keinginan Pemerintah terkait tata kelola perusahaan. (Swandari & Hadi, 2021)

F. Resource Dependency Theory

Menurut teori ketergantungan sumber daya atau yang sering disebut sebagai Resource Dependence Theory, perusahaan akan bergantung pada sumber daya dan informasi yang disediakan oleh perusahaan lain dan agen dari konteks di mana mereka terlibat sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan hidup usaha (Castrillón, 2021). Dalam keadaan ini, perusahaan bersaing dengan entitas lain yang menggunakan sumber daya terbatas yang sama. Menurut Magnanelli dan Pirolo (2021), teori ketergantungan sumber daya bergantung pada konsep bahwa keberadaan sumber daya manusia yang berbeda dan beragam merupakan fundamental untuk kinerja dewan yang lebih baik dan akibatnya untuk kinerja perusahaan yang lebih tinggi. (Prabowo & Sunarjanto, 2015)

Teori ketergantungan sumberdaya dikemukakan oleh Aldrich dan Pfeffer tahun 1976. Teori ini awalnya dikembangkan untuk memberikan perspektif alternatif bagi para ahli ekonomi mengenai mergerdanboard interlocks, dan memahami tipe hubungan interorganisasional yang memiliki peranan besar dalam “market failure” belakangan ini. Dasar dari teori ini adalah pernyataan Emerson pada tahun 1962 yang menyatakan bahwa kekuasaan (power) A atas B berasal dari kontrol atas sumberdaya yang dibutuhkan B, di mana sumberdaya tersebut tidak ditemukan di tempat lain. Sehingga pengelola perusahaan memiliki motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan otonomi perusahaan yang mereka kelola. Penekanan pada kekuasaan dan penelaahan yang hati-hati terhadap taktik yang tersedia bagi pengurus perusahaan merupakan ciri-ciri dari teori ketergantungan sumberdaya yang membedakannya dengan pendekatan lainnya.

Sumber daya yang dimiliki perusahaan antara lain dapat berupa sumber daya alam yang cukup, pemasaran yang menarik, serta karyawan dan manajer yang dapat bekerja secara profesional. Dalam resource dependency theory, sumber daya dapat secara umum didefinisikan untuk memasukkan aset, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, atau pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk memahami dan menerapkan strategi mereka. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal, maka perusahaan tersebut memiliki suatu keunggulan kompetitif dan mampu untuk berdaya saing terhadap para kompetitornya. Perusahaan harus menyadari pentingnya pengelolaan intellectual capital yang dimiliki. Apabila kinerja dari intellectual capital tersebut dapat dilakukan secara

maksimal, maka perusahaan akan memiliki suatu value added yang dapat memberikan suatu karakteristik tersendiri. Sehingga dengan adanya karakteristik tersendiri yang dimiliki, perusahaan mampu berdaya saing terhadap para kompetitornya karena mempunyai suatu keunggulan kompetitif yang hanya dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. (Amukti & Sampurno, 2023)

KESIMPULAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka kerja penting dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak stakeholders. GCG didasarkan pada teori keagenan dan stakeholder yang menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang efektif agar konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat diminimalisasi serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajiban menjadi landasan utama dalam penerapan GCG, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan investor dan meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, penerapan teori transparansi dan akuntabilitas dalam GCG sangat penting dalam membangun kepercayaan stakeholders.

Dengan mengungkapkan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab, perusahaan mampu memperkuat reputasi dan citra positif di mata publik serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini juga membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang melalui pengelolaan yang etis dan bertanggung jawab, serta menciptakan suasana bisnis yang sehat dan berkelanjutan. GCG bukan hanya sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi sebagai strategi utama dalam memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Prabantari, R. M. (2021). *konsep dan penerapan GCG Pada Lembaga Keuangan dan BUMN*. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Amukti, B. A. R., & Sampurno, R. D. (2023). Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Pertumbuhan Penjualan Dan Leverage Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan LQ-45 Tahun 2016-2021). *Diponegoro Journal of Management*, 12(1), 1–11.
- Prabowo, G., & Sunarjanto. (2015). Pengaruh Karakteristik Dewan, Struktur Kepemilikan, dan Kinerja Perusahaan Terhadap Modal Intelektual. *Fokus Manajerial*, 13(1), 39–52.
- Romadhon, F. (2020). Transparansi Pengungkapan Penghindaran Pajak Berdasarkan Perspektif Teori Pemangku Kepentingan. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(1), 54–68. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1404>
- Semnas fekon 2016. (2016). *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory, 2000*, 50–57.
- Setyawan, B. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
- Swandari, F., & Hadi, A. (2021). Good Corporate Governance. In *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020)* (Vol. 176). <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.046>
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi Dan Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi: Studi Literatur. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.